

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN, DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI

SRI MULYANI
NPM. 115111009

ABSTRACT

The purpose of this research is to study and analyze whether the implementation of birth certificate service in the Department of Population and Civil Registration (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) of Boyolali Regency had been appropriate to the legal provisions and to study and analyze the acceleration in the service of the civil document ownership in the Department of Population and Civil Registration in Boyolali Regency.

Background of this research focus is the service function in the hand of the Department of Population and Civil Registration as a government bureaucracy more focuses on the creation of a civil administration order especially related to the legal position of the citizen in the forms of civil registration certificates. The needs on the data of legal position of citizen which is in the forms of of civil registration certificates is very important for the legal certainty.

This research used the type of a juridical normative research. The location selected is the Office of the Department of Population and Civil Registration in Boyolali Regency. The characteristics of this research is descriptive which is according to Soerjono Soekamto is "a research which provides an initial data as carefully as possible about human, condition or other symptoms". Object of the research is the Implementation of Birth Certificate Service in The Department of Population and Civil Registration of Boyolali Regency. The data were obtained from some information or facts directly from the Head of the Office, the Head of the Division, the Head of Sub-division, the Head of Section, and the Officers of Service Executor.

The results of the research showed that the implementation of birth certificate service in the Department of Population and Civil Registration had been appropriate to the Act Number 24 of 2013 regarding the Amendment of Act Number 26 which regulates the civil administration because it had increased the civil service. It was directed toward the activities of increase in the public service in the civil field and increase in infrastructure of civil service. The acceleration of the service of civil document ownership of the civil administration is for creating the order of Civil Administratin by the establishment of civil database nationally as well as the validity and the correctness of the civil document issued.

Keywords: administration order and civil document.

A. PENDAHULUAN

Fungsi pelayanan yang berada di tangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai suatu birokrasi pemerintah lebih menekankan pada terciptanya tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut kedudukan hukum penduduk yang berupa akta-akta catatan sipil. Kebutuhan akan data kependudukan hukum penduduk yang berupa akta-akta catatan sipil sangat penting dalam rangka kepastian hukum dan perencanaan administrasi pemerintahan, khususnya terhadap masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu akta-akta catatan sipil memberikan manfaat yang sangat besar bagi seseorang. Adapun kegunaan akta-akta catatan sipil tersebut adalah (Pedoman Pelayanan Catatan Sipil, 2000: 3).

1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak.
2. Akta-akta catatan sipil merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
3. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.
4. Khusus untuk akta kelahiran dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam pembuatan paspor, kewarganegaraan, KTP, untuk persyaratan sekolah, melamar pekerjaan, syarat pernikahan dan lain sebagainya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyelenggaraan pelayanan akta pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan ketentuan hukum?
2. Bagaimanakah percepatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Boyolali?

C.TUJUAN PENELITIAN

Mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan ketentuan hukum, serta mengkaji dan menganalisis percepatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Boyolali.

D.METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekamto dalam bukunya metode penelitian hukum bahwa penelitian yang menggunakan atau melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif menurut Soerjono Soekamto dalam bukunya metode penelitian hukum bahwa “penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”. Obyek penelitian adalah penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali.

4. Bahan atau Materi Penelitian

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/materi penelitian tersebut berupa :

a. Data primer

Sumber data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Petugas Pelaksana Pelayanan.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang paling utama dan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini yakni Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2) Bahan hukum lain yang berupa data hukum di Kantor Catatan Sipil ditambah berupa buku literatur, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpul Data

a. Penelitian lapangan

Digunakan untuk memperoleh data primer yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap obyek penelitian atau gejala-gejala yang diketahui dan mengadakan pencatatan secara sistematis. Adapun cara yang dilakukan adalah :

1) Observasi atau pengamatan

Yaitu mengadakan pengamatan langsung yang berarti melihat, mendengar, atau mengamati keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis akan mengamati secara langsung penyelenggaraan pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali.

2) Wawancara

Di dalam wawancara ini dengan pejabat Kadisdukcapil, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan masyarakat yang terkait. Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang bebas yang berkaitan dengan topic pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali.

b. Studi Pustaka

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang terkait dengan materi penelitian, kemudian menyusun sebagai sajian data. Dan juga dilakukan

pengumpulan data dengan mencatat atau merekam data-data yang berkaitan dengan pokok materi yang ingin diketahui.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data yang diperoleh di lapangan. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Mengingat data yang dipakai adalah data kualitatif, maka setelah data sudah terkumpul, dikualifikasikan dihubungkan dengan teori dan diambil keputusan atau kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan nara sumber/ pihak yang terkait yang kemudian membandingkan dengan teori hukum serta peraturan-peraturan hukum positif yang akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti. Adapun untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu polapikir yang mendasarkan pada hal yang khusus ke hal yang bersifat umum.

E. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Penyelenggaraan Pelayanan Akta pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali

Substansi dari pelaksanaan Program Dispensasi Akta Kelahiran, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan ketegasan dan kedudukan hukum

seseorang terhadap hak-hak sipil. Oleh karena itu, lembaga pencatatan sipil dimaksudkan untuk bisa mencatat secara lengkap tentang peristiwa penting dari seseorang mulai dari lahir, perkawinan sampai kematian berikut segala dimensi yang menyertai kejadian-kejadian tersebut.

Dari berbagai pokok pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang banyak dibutuhkan masyarakat adalah Akta Kelahiran, karena akta inilah yang sering muncul sebagai salah satu elemen penting dalam pembuktian status hukum seseorang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya dalam kepemilikan Akta Kelahiran.

2. Percepatan Pelayanan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dokumen kependudukan bagi penduduk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-hari di Indonesia. dokumen kependudukan selain menunjukkan status hukum/ legal seseorang, juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, intervensi kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan bahwa dokumen kependudukan merupakan kewajiban negara

untuk memberikan status legal bagi warganya, sekaligus sebagai sumber data kependudukan.

Walapun pemberian dokumen ini menganut stelsel aktif dimana telah menjadi kewajiban pemerintah, namun demikian tingkat kesadaran penduduk menjadi satu hal yang penting untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan inovasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan serta mempermudah pelayanan terutama bagi penduduk yang difable baik fisik, ekonomi maupun sosial. Pendekatan pelayanan menjadi salah satu strategi untuk peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, karena dengan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, akurat dan dinamis, maka dalam penyusunan rencana pembangunan serta penentuan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik menyeluruh dan terpadu.

F.KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 26 yang mengatur administrasi kependudukan karena telah mewujudkan peningkatan pelayanan kependudukan. Hal ini diarahkan untuk kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan, pembangunan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, pengembangan data base kependudukan, pendokumentasian register Akta Catatan Sipil, peningkatan

SDM Aparatur, dan peningkatan kapasitas aparat Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Percepatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan administrasi kependudukan yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam melakukan administrasi kependudukan di Kabupaten Boyolali. Hal ini untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dokumen kependudukan bagi penduduk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terwujud legalitas kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi* (Edisi terjemahan oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Bryson, Moris. 1998. *Statistic Planning for Public and Non Profit Organization*. San Francisco: Jessy-Bass.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. 2002. *Sukoharjo dalam Angka*. Sukoharjo: Percetakan Daerah Kabupaten Sukharjo.
- B. Boediono. 1999. *Pelayanan Prima, Fokus Bahaan Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Kawula Muda.
- Darji Darmodiharjo. 1999. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta.
- Henry, Nicholas. 1980. *Public Administration and Public Affairs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya; Insan Cendekia.
- LIB. Sutopo. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makalah disajikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Soedirman Purwokerto. Surakarta: Penelitian UNS.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2000. *Pedoman Penetapan Akuntabililitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Percetakan LAN.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 1985. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud. MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. 2001. *Birokrasi dalam Polemik*. Saiful Arif (editor). Malang: Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pemerintah Kabupaten Sragen. *Pedoman Pelayanan Catatan Sipil*. Sragen : Percetakan Daerah Kabupaten Sragen.
- Sarsito. 2000. *Upaya Peningkatan Pendapatan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Manajemen STIF Mitra Indonesia Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta.
- Subekti. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suhino. 1989. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Galia Indonesia.
- T. Hani Handoko. 1984. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Victor M. Situmorang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang *Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1983 tentang *Penataan dan Pemakaian Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- _____. Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor 31/ U/ IN/ 12/ 1996 tentang *Pemberlakuan Catatan Sipil bagi Seluruh Penduduk Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- _____. Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Umum*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Pembentukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kodya Dati II di Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1983 tentang *Pelayanan Umum*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.

- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang *Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan*. Jakarta: Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*. Jakarta: Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang *Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk*. Jakarta: Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311 Tahun 1988 tentang *Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran*. Jakarta: Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.